

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini memiliki judul “Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan *Desa*” memiliki rumusan masalah (1) Arti penting Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dirugikan dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki dua lembaga yang sangat penting yang pertama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD berperan sebagai mitra dari kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa serta dalam membentuk peraturan desa. BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa serta memiliki tugas menggali aspirasi masyarakat desa. BPD dipilih melalui dua cara yaitu dengan musyawarah keterwakilan dan pemilihan langsung. Dalam proses pemilihan BPD sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan mengakibatkan calon anggota BPD yang mencalonkan diri dirugikan haknya. contohnya kecurangan terjadi di Desa Jaten Kabupaten Karanganyar, Desa Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan Desa Karya Mukti Kabupaten Batanghari. Dengan kerugian yang dialami calon anggota BPD tersebut, mereka melakukan sebuah upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan.

Setiap orang memiliki hak untuk berpolitik, termasuk calon anggota BPD yang mencalonkan dirinya merupakan realisasi dari hak berpolitik. Apabila hak berpolitik seseorang dirugikan tentunya seseorang tersebut dapat melakukan sebuah upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Dalam pemilihan BPD yang tidak sesuai dengan prosedur calon anggota BPD dapat melakukan upaya hukum menggugat perbuatan panitia pemilihan atau kepala desa ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan administrasi yang merugikan.

Kata kunci: BPD, Penyelesaian Sengketa, Pemilihan BPD, Mekanisme Hukum

ABSTRACT

In this thesis research entitled "Dispute Resolution in the Election of Members of the Village Consultative Body" has the formulation of the problem (1) The significance of the Village Consultative Body in the administration of the Village Government and (2) Legal efforts that can be taken by prospective members of the Village Consultative Body who are disadvantaged in the process the election of the Village Consultative Body. The research method used is normative juridical with statutory approach and conceptual approach.

In carrying out village administration, there are two very important institutions, the first being the village head and the Village Consultative Body (BPD). The BPD acts as a partner of the village head in running the village administration and in forming village regulations. BPD has a function as channeling the aspirations of rural communities and has the task of exploring the aspirations of rural communities. BPD is chosen in two ways, namely through representation and direct election. In the process of electing BPD, fraud is often committed by several parties, and it results in potential candidates for BPD candidates who lose their rights being disadvantaged. For example, fraud occurred in Jaten Village, Kalaena Village and Karya Mukti Village. With the losses suffered by prospective members of the BPD, they make a legal effort to uphold the values of justice.

Everyone has the right to politicize, including candidates for BPD members who nominate themselves are the realization of political rights. If someone's political rights are harmed, surely someone can make a legal effort to get justice. In the selection of a BPD that is not in accordance with the procedures of a candidate for a BPD member, they can take legal action to sue the election committee or village head to the State Administrative Court for adverse administrative actions.

Keywords: Village Consultative Body, Dispute Resolution, Election of Village Consultative Body , Legal Efforts